

# KOMPETENSI APARATUR PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN DANA DESA DI KABUPATEN SANGGAU PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Muara Goodmen Sianturi

NPP. 31.0596

Asdaf Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat  
Program Manajemen Sumber Daya Manusia Sektor Publik  
Email: sianturi.goodman@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Stenly Ferdinand Pangerapan, AP, M.Si

## ABSTRACT

**Problem Statment/Background (GAP):** Despite the continuous increase in village fund allocations in Sanggau Regency over the past three years, the reality is that development in the villages remains stagnant and has not progressed as expected. This indicates a gap between the increased funds received and the competence of village officials in managing these funds, which is influenced by the still low levels of education and training. **Purpose:** To analyze and describe the Competence of Village Government Apparatus in Managing Village Funds in Sanggau Regency, the inhibiting factors of village apparatus in managing village funds in Sanggau Regency, and the government's efforts to overcome these obstacles. **Methods:** This research uses a descriptive qualitative research method, with data collection techniques including interviews, observation, and document study. **Results:** The implementation of village fund management in Sanggau Regency is quite good, although there are still obstacles such as low human resources, lack of understanding of village officials regarding their main duties and functions, and insufficient training for village fund management officials. The research concludes that the competence of village officials in managing village funds is quite good in terms of attitude, but there needs to be an improvement in skills and knowledge. The main inhibiting factors are low human resources, lack of understanding of village officials' duties and functions, and minimal training. Efforts to overcome these obstacles include appropriate recruitment and selection, socialization about main duties and functions, and training for village fund management officials. The suggestions proposed include routine training and education, clear task distribution, and continuous evaluation and improvement. **Conclusion:** The researcher concludes that the competence of village officials in managing village funds is quite good in terms of attitude, but skills and knowledge still need to be improved. The inhibiting factors found include low human resources, lack of understanding of village officials regarding their main duties and functions, and insufficient training for village fund management officials. Efforts to overcome these obstacles include appropriate recruitment and selection, providing guidance or socialization regarding main duties and functions, and providing training for village fund management officials.

**Keywords:** Employees, Village Fund, Competence

## ABSTRAK

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP):** Meskipun alokasi dana desa di Kabupaten Sanggau terus meningkat dalam tiga tahun terakhir, kenyataannya pembangunan di desa-desa masih stagnan dan tidak berkembang sesuai harapan. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara peningkatan dana yang diterima dengan kompetensi aparatur desa dalam mengelola dana tersebut, yang dipengaruhi oleh tingkat pendidikan dan pelatihan yang masih rendah. **Tujuan:** untuk menganalisis dan mendeskripsikan Kompetensi Aparatur Pemerintahan Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Sanggau, faktor penghambat aparatur desa dalam pengelolaan dana desa di Kabupaten Sanggau serta upaya pemerintah dalam mengatasi hambatan tersebut. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi dan studi dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Pelaksanaan pengelolaan dana desa di Kabupaten Sanggau sudah cukup baik meskipun masih terdapat hambatan, seperti rendahnya sumber daya manusia, kurangnya pemahaman aparatur desa mengenai tugas pokok dan fungsi, serta kurangnya pelatihan bagi aparatur pengelola dana desa. Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa kompetensi aparatur desa dalam pengelolaan dana desa cukup baik dalam hal sikap, tetapi perlu peningkatan dalam keterampilan dan pengetahuan. Faktor penghambat utama adalah rendahnya sumber daya manusia, kurangnya pemahaman tugas dan fungsi aparatur desa, serta minimnya pelatihan. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan ini meliputi rekrutmen dan seleksi yang tepat, sosialisasi mengenai tugas pokok dan fungsi, serta pelatihan bagi aparatur desa. Saran yang diusulkan mencakup pelatihan dan pendidikan rutin, pembagian tugas yang jelas, serta evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. **Kesimpulan:** Peneliti menyimpulkan bahwa kompetensi aparatur desa dalam pengelolaan dana desa sudah cukup baik dalam dimensi sikap, namun keterampilan dan pengetahuan masih perlu ditingkatkan. Faktor penghambat yang ditemukan meliputi rendahnya sumber daya manusia, kurangnya pemahaman aparatur desa mengenai tugas pokok dan fungsinya, serta kurangnya pelatihan bagi aparatur pengelola dana desa. Upaya untuk mengatasi hambatan ini mencakup rekrutmen dan seleksi yang tepat bagi aparatur desa, memberikan pengarahan atau sosialisasi mengenai tugas pokok dan fungsi, serta memberikan pelatihan bagi aparatur desa pengelola dana desa.

**Kata kunci:** Aparatur, Dana Desa, Kompetensi

### I. PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Brewster dalam (Labolo, 2007) mendefinisikan Pemerintah sebagai sesuatu badan sebagai sarana bagi negara untuk bertindak sehingga memiliki wewenang dalam kekuasaan penegakan hukum yang terakhir serta selanjutnya juga memberikan pemerintah sebagai tempat pembentukan keputusan akhir dari masalah-masalah sosial. Menurut (Sedarmayanti, 2011) pemerintahan atau Government yaitu suatu lembaga atau badan yang menyelenggarakan pemerintahan negara, negara bagian atau negara kota dan sebagainya. Oleh karena itu Pemerintah mempunyai tanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Dalam suatu negara memang tidak dapat terelakkan dan harus dijalankan, terlebih di Indonesia pemerintah sangat dibutuhkan oleh para masyarakat karena dengan penyelenggaraan pemerintahan yang baik maka pembangunan pun dapat juga berjalan dengan baik

terlebih dalam pembangunan di desa. Menurut Sumihardjo (2012), “Pengertian umum aparatur, lebih menyoroti kepada seorang pegawai pemerintahan yang digaji dan berkerja di bidang pemerintahan serta melakukan tugas pelayanan umum.” Jadi secara sempit orang secara umum mengartikan aparatur sama dengan pegawai pemerintahan, sedangkan dalam arti luas ialah instrumen pendukung kegiatan penyelenggaraan negara yaitu organisasi, kepegawaian, keuangan dan aset serta peralatan dan teknologi. Menurut Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu mendapat perhatian bahwa sekarang desa dalam susunan dan penyelenggaraannya diatur dengan undang undang sendiri menunjukkan bahwa ada perhatian lebih khusus dari pemerintah kepada desa sebagai basis utama dalam pembangunan di Indonesia. Hal ini sesuai dengan tujuan undang undang tersebut yaitu memberikan pengakuan dan penghormatan atas desa yang sudah ada sejak sebelum kemerdekaan Indonesia sehingga membentuk pemerintahan desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab untuk mewujudkan masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan Indonesia.

Desa merupakan unit paling dasar dalam pemerintahan di Indonesia adalah sebagai ujung tombak pemerintah kepada masyarakat. Peran Desa sangat penting dan strategis dalam penataan sistem pemerintahan Indonesia dalam pembangunan nasional. Desa menjadi penting untuk membangun Indonesia dari bawah agar terciptanya pembangunan yang efisien, efektif dan juga merata karena langsung mendapat perhatian dari masyarakat sehingga akan adanya transparansi dalam pelaksanaan pembangunan tersebut.

**Tabel 1. 1**  
**Data Desa Maju Kabupaten Sanggau**

<i>Kecamatan</i>	<i>Jumlah Desa</i>	
	2021	2022
<i>Kapuas</i>	2	4
<i>Mukok</i>	1	1
<i>Noyan</i>	0	0
<i>Jangkang</i>	0	0
<i>Bonti</i>	0	0
<i>Beduai</i>	0	0
<i>Sekayam</i>	3	3
<i>Kembayan</i>	1	0
<i>Parindu</i>	4	4
<i>Tayan Hulu</i>	0	0
<i>Tayan Hilir</i>	1	2
<i>Balai</i>	1	1
<i>Toba</i>	0	1
<i>Meliau</i>	5	8
<i>Entikong</i>	1	1
<b>Total</b>	<b>19</b>	<b>25</b>

*Sumber : Diolah oleh penulis, 2024*

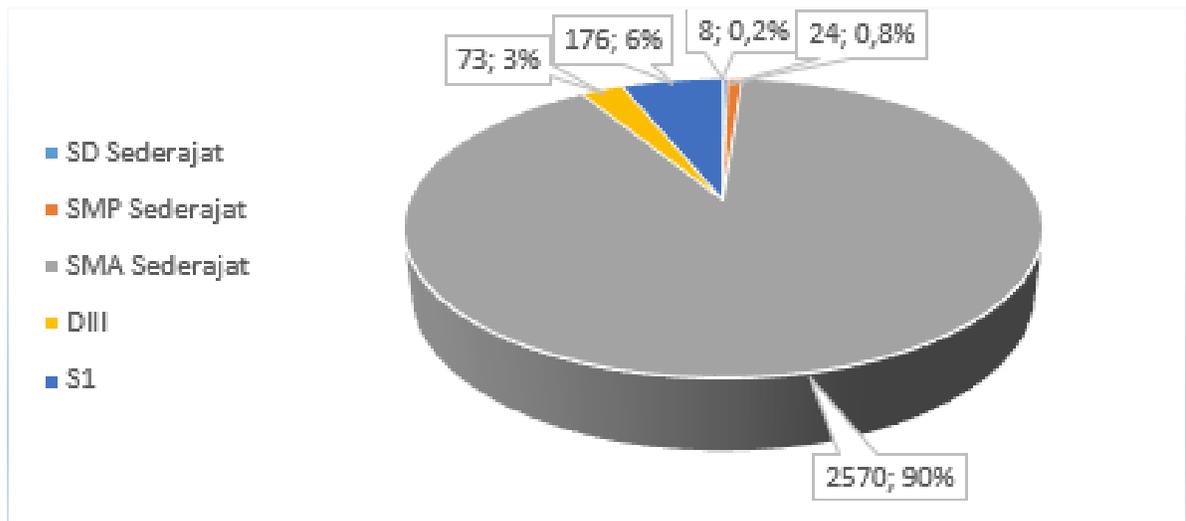
Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat jumlah desa dengan indekas maju di setiap kecamatan di Kabupaten Sanggau yang terbilang masih cukup sedikit bila dihubungkan dengan dana desa yang besar. Dari total 163 desa yang ada di Kabupaten Sanggau tahun 2021 hanya 19 desa yang dikatakan desa maju dan tahun 2022 hanya 25 desa dari 163 desa yang ada di Kabupaten Sanggau.

Dana Desa yang bersumber dari berbagai sumber tadi digunakan dan dikelola dengan tujuan pelaksanaan pembangunan di Desa. Pada saat ini pemerintah desa sudah memiliki kewenangan bagi tiap-tiap desa untuk mengelola dan mengurus urusan dengan prioritas program yang telah dicanangkan dan ditetapkan. Dengan dana desa tersebut diharapkan bisa menjadi suatu jalan terobosan bagi desa-desa untuk menjawab tantangan percepatan pembangunan yang dimulai dari desa terutama pada daerah 3T, untuk itu harus adanya juga kesiapan dan kemampuan para aparatur desa yang ada dalam mengurus pengelolaan dana desa tersebut, terlebih untuk Kepala Desa yang memimpin suatu desa dan memegang tanggung jawab penuh terhadap daerah yang dipimpinnya. Para aparatur desa seyogyanya harus siap menjadi penggerak dalam melaksanakan dan menyelenggarakan roda pemerintahan desa demi terwujudnya pembangunan dari program program pemerintahan di desa tersebut.

### **1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)**

Aparatur pemerintah desa yang menjadi penggerak pemerintahan desa harus memiliki kompetensi yang ahli dibidangnya. Kurangnya kompetensi aparatur pemerintah desa dalam melaksanakan tugasnya sebagai aparatur pemerintahan desa dan juga dalam mengelola dana desa menjadi suatu masalah yang sering terjadi di desa-desa di Kabupaten Sanggau, hal ini disebabkan karena kurangnya tingkat pendidikan yang ditempuh oleh para aparatur pemerintahan desa yang ada di Kabupaten Sanggau terlebih jika berbicara di desa yang letaknya jauh dari pusat kota.

**Gambar 1.1**  
**Aparatur Desa Berdasarkan Pendidikan Terakhir**



Sumber : Diolah oleh penulis, 2024

Berdasarkan data diagram pie diatas dapat dilihat dan disimpulkan bahwa pendidikan terakhir aparatur desa di Kabupaten Sanggau sebagian besar yaitu berpendidikan terakhir tamat SMA atau sederajat yaitu 90%. Jenjang pendidikan bagi aparatur pemerintah desa tentu mempengaruhi kompetensi dan jalannya birokrasi di pemerintahan desa, terutama aparatur desalah yang akan melaksanakan pengelolaan keuangan desa mulai dari APBDes hingga mengelola dana desa. Dengan data diatas juga masih terdapat aparatur desa yang hanya berpendidikan terakhir SD dan SMP sederajat yaitu 1,1 persen, walaupun jumlahnya terbilang sedikit tetapi dengan latar belakang pendidikan yang hanya tamat SD dan SMP tentunya penyelenggaraan pengelolaan dana desa akan menjadi tidak efektif dan efisien, dan juga yang berlatar belakang pendidikan S1 terbilang masih sedikit yaitu hanya 6,1 persen dimana dengan angka itu tentu pengelolaan dana desa untuk pembangunan desa tidak akan merata antara satu desa dengan desa lainnya di Kabupaten Sanggau.

Kurangnya kompetensi aparatur pemerintah desa dalam melaksanakan tugasnya dan dalam pengelolaan dana desa menjadi suatu masalah yang terjadi disebagian besar desa di Kabupaten Sanggau, ini disebabkan karena kurangnya tingkat pendidikan yang ditempuh dari tiap-tiap Kepala Desa dan aparatur desa yang ada di Kabupaten Sanggau. Kompetensi yang harus dimiliki oleh aparatur desa dalam peranannya mengelola dana desa adalah yang berpengetahuan, berketerampilan dan juga sikap yang baik. Berbicara mengenai kompetensi aparatur desa tentu tingkat kecamatan juga turut andil dalam berkembangnya masyarakat desa dan juga kompetensi aparatur desa, pada tingkat kecamatan tentu juga harus memiliki sumber daya manusia dan kompetensi yang baik agar dapat mengelola bawahan yaitu tingkat desa dengan baik pula. Tentu permasalahan akan terjadi jika kurang berkualitasnya sumber daya manusia yang ada, hal berikutnya yang menjadi masalah adalah

dikarenakan kurangnya pemberian pelatihan keterampilan oleh pemerintah Kabupaten Sanggau kepada aparatur desa dalam mengelola dana desa.

Keterbatasan kemampuan dan kompetensi yang dimiliki oleh aparatur desa di Kabupaten Sanggau sehingga menyebabkan aparatur desa juga kurang efektif dalam memberikan pemahaman maupun sosialisasi kepada masyarakat desa tentang kebijakan alokasi dana desa dan manfaatnya bagi desa. Dengan kurangnya sosialisasi mengenai dana desa yang digunakan tentu program-program desa yang telah ditetapkan juga sulit terealisasi dan kurang menyentuh masyarakat sehingga kurangnya juga partisipasi masyarakat untuk dapat memberikan usulan tentang program-program yang memang sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa di Kabupaten Sanggau.

### 1.3 Penelitian Terdahulu

- 1) **Pentingnya Pelatihan dan Peningkatan Kompetensi:** Penelitian oleh Sari et al. (2018) menyoroti pentingnya pelatihan dan peningkatan kompetensi bagi aparat pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelatihan yang tepat dapat meningkatkan pemahaman tentang peraturan dan tata kelola dana desa serta kemampuan manajerial dalam pengelolaan anggaran.
- 2) **Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia:** Penelitian oleh Wibowo (2019) menemukan bahwa kualitas sumber daya manusia di tingkat desa memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengelolaan dana desa. Aparatur yang memiliki kompetensi yang memadai dalam bidang akuntansi dan pengelolaan keuangan akan mampu menjalankan proses pengelolaan dana desa dengan lebih efisien dan transparan.
- 3) **Penerapan Sistem Informasi:** Penelitian oleh Rahman (2020) menunjukkan bahwa penerapan sistem informasi dalam pengelolaan dana desa dapat membantu meningkatkan kompetensi aparat pemerintah desa. Sistem informasi yang baik akan memudahkan proses pelaporan, pemantauan, dan evaluasi penggunaan dana desa secara real-time.
- 4) **Tantangan Administrasi dan Keuangan:** Penelitian oleh Setiawan (2021) mengidentifikasi beberapa tantangan dalam pengelolaan dana desa yang dihadapi oleh aparat pemerintah desa, seperti kompleksitas administrasi dan kurangnya pemahaman tentang aspek keuangan. Penelitian ini menyoroti perlunya peningkatan kompetensi dalam bidang administrasi dan keuangan.
- 5) **Peran Kepemimpinan:** Penelitian oleh Pratama (2018) menekankan peran kepemimpinan dalam meningkatkan kompetensi aparat pemerintah desa. Kepala desa yang memiliki kemampuan kepemimpinan yang baik dapat memberikan arahan, motivasi, dan dukungan yang diperlukan untuk meningkatkan kompetensi dan kinerja aparat dalam pengelolaan dana desa.
- 6) **Dampak Partisipasi Masyarakat:** Penelitian oleh Handayani (2019) menyoroti dampak partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa terhadap kompetensi aparat pemerintah desa. Tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi dapat mendorong aparat desa untuk meningkatkan kompetensinya demi menjawab kebutuhan dan aspirasi masyarakat.
- 7) **Evaluasi Kinerja:** Penelitian oleh Fitriani (2020) menekankan pentingnya evaluasi kinerja aparat pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa sebagai upaya meningkatkan kompetensi. Evaluasi kinerja yang teratur dapat mengidentifikasi kelemahan dan area yang perlu diperbaiki dalam pengelolaan dana desa.

- 8) **Pengaruh Regulasi:** Penelitian oleh Nugroho (2021) mengamati pengaruh regulasi terhadap kompetensi aparat pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa. Regulasi yang jelas dan mendukung dapat membantu meningkatkan pemahaman dan kepatuhan aparat desa terhadap aturan-aturan yang berlaku.
- 9) **Tantangan Teknologi:** Penelitian oleh Cahyono (2019) mengidentifikasi tantangan terkait penggunaan teknologi dalam pengelolaan dana desa yang mempengaruhi kompetensi aparat pemerintah desa. Kurangnya akses atau pemahaman terhadap teknologi dapat menjadi hambatan dalam efektivitas pengelolaan dana desa.
- 10) **Peningkatan Transparansi:** Penelitian oleh Saputra (2022) menyoroti pentingnya transparansi dalam pengelolaan dana desa sebagai faktor peningkatan kompetensi aparat pemerintah desa. Dengan meningkatnya transparansi, aparat desa akan lebih terdorong untuk meningkatkan kompetensinya agar dapat memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat.

#### **1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penelitian ini membawa kontribusi yang signifikan dalam konteks pengembangan administrasi publik, khususnya dalam pengelolaan dana desa di tingkat lokal. Meskipun telah ada beberapa penelitian terdahulu yang membahas topik serupa, namun penelitian ini menawarkan pendekatan yang lebih terperinci dan kontekstual, terutama dalam konteks Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat. Keberadaan literatur yang terbatas tentang pengelolaan dana desa di daerah ini menunjukkan bahwa penelitian ini akan memberikan sumbangan yang berharga dalam pemahaman praktik pengelolaan dana desa dan kompetensi aparat pemerintah desa di wilayah tersebut.

Selain itu, penelitian ini juga menghadirkan aspek kebaruan melalui pendekatan yang lebih holistik dan inklusif terhadap kompetensi aparat pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa. Dengan memperhatikan berbagai faktor yang mempengaruhi kinerja dan kompetensi aparat desa, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang tantangan dan peluang dalam pengelolaan dana desa. Pendekatan ini diharapkan dapat menjadi landasan bagi pengembangan kebijakan yang lebih efektif dan efisien dalam peningkatan kompetensi aparat pemerintah desa dan pengelolaan dana desa secara keseluruhan. Dengan demikian, penelitian ini menjanjikan kontribusi yang berarti dalam literatur administrasi publik dan pengelolaan dana desa serta memberikan wawasan yang berharga bagi praktisi dan pembuat kebijakan di tingkat lokal maupun nasional.

#### **1.5 Tujuan**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis kompetensi aparat pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa di Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat. Penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam kemampuan dan keterampilan yang dimiliki oleh aparat desa dalam mengelola dana desa, serta untuk mengevaluasi faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja mereka dalam konteks pengelolaan keuangan yang transparan, efisien, dan akuntabel. Dengan demikian, tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang tantangan dan potensi dalam pengelolaan dana desa di tingkat lokal, dengan harapan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih tepat dan efektif bagi peningkatan

kinerja dan kompetensi aparat pemerintah desa serta peningkatan kesejahteraan masyarakat desa secara keseluruhan.

## **II. METODE**

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif deskriptif yang memungkinkan penyesuaian rencana awal dengan situasi yang sebenarnya di lapangan, serta menerapkan metode induktif untuk memahami makna dari data yang kompleks (Simangunsong, 2017). Dengan menggunakan metode ini, peneliti akan menjelaskan secara sistematis dan mendalam tentang kompetensi aparatur pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa di Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat. Fokus penelitian akan pada fakta-fakta lapangan yang menjadi dasar analisis terhadap masalah yang sebenarnya terjadi, dengan tujuan untuk menghasilkan pemahaman yang komprehensif dan mendalam serta menyajikan laporan yang faktual dan sesuai dengan kondisi yang ada.

Dalam operasionalisasi konsep kompetensi menurut Wibowo (2016), variabel kompetensi diurai menjadi tiga dimensi utama: keterampilan, pengetahuan, dan sikap. Keterampilan diukur melalui indikator seperti keterampilan yang dibutuhkan dalam menyelesaikan tugas dan kemampuan mengerjakan tugas. Pengetahuan diukur melalui pengetahuan dari pendidikan maupun pengalaman, serta pemahaman bidang kerja yang dimiliki. Sedangkan sikap diukur melalui sikap yang ditunjukkan saat mengerjakan tugas dan pengendalian emosi pegawai saat menghadapi pekerjaan. Dengan demikian, operasionalisasi konsep ini memberikan pemahaman yang jelas tentang variabel kompetensi yang akan diukur dalam penelitian ini, dengan merujuk pada konsep teoretis yang ada dan menguraikannya menjadi dimensi dan indikator yang spesifik.

Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa melalui wawancara dengan berbagai pihak terkait, seperti asisten daerah, kepala dinas, sekretaris dinas, serta kepala bidang-bidang terkait. Sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen yang ada di dinas tersebut serta dari sumber-sumber lain seperti internet, jurnal, dan artikel. Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan teknik purposive sampling dan snowball sampling untuk memilih informan yang dianggap memiliki informasi yang relevan dan mendalam. Dengan demikian, pemilihan informan dilakukan dengan mempertimbangkan variasi dan kebutuhan penelitian, dengan harapan dapat memperoleh informasi yang akurat dan paripurna sesuai dengan keperluan penelitian (Simangunsong, 2017).

Penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Melalui teknik wawancara, peneliti akan berinteraksi langsung dengan informan untuk mendapatkan informasi yang relevan dan mendalam mengenai kompetensi aparatur desa dalam pengelolaan dana desa. Penelitian ini mengadopsi pendekatan wawancara semi terstruktur, di mana peneliti telah menyiapkan pedoman wawancara yang akan digunakan untuk menuntun percakapan dengan informan. Selain wawancara, observasi juga digunakan untuk mengamati langsung aktivitas yang terjadi di lapangan, khususnya di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa serta di beberapa desa di Kabupaten Sanggau. Teknik observasi ini akan membantu peneliti memperoleh

pemahaman yang lebih holistik tentang praktik pengelolaan dana desa dan kompetensi aparatur desa. Selain itu, pengumpulan data juga dilakukan melalui dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan dan menganalisis berbagai dokumen terkait, seperti peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan teori para ahli yang berkaitan dengan sistem informasi pemerintahan daerah.

Proses pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode field research approach, di mana peneliti secara langsung terlibat dalam situasi lapangan untuk mengamati dan berinteraksi dengan para informan. Teknik observasi dilakukan dengan pendekatan partisipasi, di mana peneliti akan aktif terlibat dalam kegiatan yang diamati di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa serta di beberapa desa yang menjadi lokasi penelitian. Selain itu, penggunaan teknik wawancara semi terstruktur memungkinkan peneliti untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam dan terbuka dari para informan, sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan dalam pedoman wawancara. Seluruh proses pengumpulan data dilakukan dengan memperhatikan etika penelitian dan mengutamakan validitas serta reliabilitas data.

Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah analisis data. Proses analisis data dilakukan melalui tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dalam tahap reduksi data, peneliti akan memilih, memusatkan perhatian, dan memfokuskan pada hal-hal yang pokok dalam data yang telah terkumpul. Kemudian, data akan disajikan dalam bentuk yang terorganisasi dan terstruktur untuk mempermudah pemahaman dan penarikan kesimpulan. Terakhir, peneliti akan menarik kesimpulan dari data yang telah dianalisis, mengidentifikasi temuan baru, dan mengembangkan hipotesis yang sesuai dengan masalah penelitian. Dengan demikian, proses pengumpulan dan analisis data ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang kompetensi aparatur desa dalam pengelolaan dana desa di Kabupaten Sanggau.

### **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1. Hasil Penelitian**

##### **3.1.1 Data Aparatur**

Data mengenai jumlah aparatur desa dan pendidikan terakhir kepala desa di Kabupaten Sanggau memberikan gambaran yang penting dalam mengevaluasi kapasitas sumber daya manusia yang tersedia untuk pengelolaan dana desa. Dari data jumlah aparatur desa per kecamatan, terlihat bahwa setiap desa memiliki cukup banyak aparatur desa, yang seharusnya menjadi modal yang cukup untuk menjalankan pengelolaan dana desa secara efektif. Namun, penting untuk diingat bahwa jumlah yang banyak tidak selalu berarti kualitas yang baik. Oleh karena itu, perlu juga untuk melihat tingkat pendidikan terakhir dari para aparatur desa dan kepala desa. Data menunjukkan bahwa sebagian besar kepala desa hanya berpendidikan SMA/Sederajat, dengan jumlah yang signifikan tidak memiliki latar belakang pendidikan yang lebih tinggi seperti S1 atau D3. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat kebutuhan untuk meningkatkan kualifikasi pendidikan para kepala desa guna meningkatkan kompetensi mereka dalam pengelolaan dana desa.

Selain itu, data juga menggambarkan bahwa hanya sedikit kepala desa yang memiliki latar belakang pendidikan yang lebih rendah, seperti tamatan SMP atau SD. Meskipun jumlah mereka sedikit, namun

hal ini menunjukkan bahwa masih ada tantangan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di tingkat kepala desa. Meningkatkan pendidikan dan kualifikasi para kepala desa dapat menjadi salah satu langkah penting dalam meningkatkan kapasitas mereka dalam mengelola dana desa secara efektif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, peningkatan pendidikan dan pelatihan bagi para aparatur desa, khususnya para kepala desa, perlu menjadi perhatian dalam upaya meningkatkan kualitas pengelolaan dana desa di Kabupaten Sanggau.

### **3.1.2 Data Sarana dan Prasarana**

Data mengenai sarana dan prasarana di Desa Lape Kabupaten Sanggau memberikan gambaran tentang kondisi infrastruktur yang tersedia di tingkat desa, yang mencakup berbagai aspek seperti fasilitas umum, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Meskipun demikian, dari data yang disajikan, terlihat bahwa masih ada beberapa kekurangan dalam sarana dan prasarana yang ada di desa tersebut. Misalnya, kurangnya jumlah aula desa dan kantor BPD yang bisa mempengaruhi berbagai kegiatan masyarakat dan administrasi desa. Selain itu, terlihat bahwa beberapa sarana dan prasarana, seperti pasar tradisional, masih belum tersedia di Desa Lape. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun dana desa mungkin cukup besar, masih ada aspek-aspek infrastruktur yang perlu diperhatikan lebih lanjut untuk meningkatkan kualitas hidup dan pengelolaan dana desa secara efektif.

Di sisi lain, data mengenai sarana dan prasarana yang ada di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPM Pemdes) Kabupaten Sanggau memberikan gambaran tentang fasilitas yang tersedia untuk mendukung operasional dan pelayanan kepada masyarakat. Dengan adanya ruang kerja yang memadai, perangkat komputer, dan kendaraan dinas, diharapkan dapat mempermudah tugas dan tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan desa serta penyelenggaraan pemerintahan desa secara efisien. Meskipun begitu, peningkatan sarana dan prasarana yang lebih baik di DPM Pemdes juga dapat memberikan kontribusi positif dalam mendukung kinerja dan pengelolaan dana desa secara lebih efektif. Dengan demikian, perbaikan dan pengembangan infrastruktur di tingkat desa dan instansi terkait akan menjadi penting dalam memastikan pengelolaan dana desa yang optimal dan berkelanjutan.

### **3.1.3 Data Anggaran Desa**

Data anggaran dana desa di Kabupaten Sanggau memberikan gambaran tentang tren peningkatan alokasi anggaran yang tersedia untuk pembangunan dan pelayanan masyarakat di tingkat desa. Dari tahun 2021 hingga 2023, terjadi peningkatan jumlah dana desa secara signifikan, menunjukkan komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut. Kenaikan ini juga mencerminkan pentingnya peran dana desa dalam mendukung berbagai program pembangunan dan pelayanan masyarakat di tingkat lokal.

Selain itu, peneliti juga menyoroti kenaikan anggaran dana desa dari tiga sampel desa, yaitu Desa Sungai Mawang, Desa Lape, dan Desa Pana, yang merupakan bagian dari Kabupaten Sanggau. Dari data yang disajikan, terlihat bahwa setiap tahunnya terjadi peningkatan anggaran dana desa di ketiga desa tersebut. Hal ini menunjukkan upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk memperkuat

pembangunan dan pelayanan di tingkat desa, serta menunjukkan komitmen dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

#### **3.1.4 Data Pelayanan Desa**

Data kemudahan pelayanan di berbagai aspek di tiga desa yang menjadi sampel menyoroti berbagai dimensi penting dalam kualitas hidup masyarakat desa. Pelayanan administratif yang mudah di ketiga desa menunjukkan upaya pemerintah desa dalam memastikan akses yang lancar terhadap layanan administratif, yang menjadi fondasi penting dalam kegiatan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Kemudahan akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, infrastruktur, sosial, ekonomi, dan keamanan di desa-desa tersebut memberikan gambaran tentang seberapa baik kebutuhan dasar dan kepentingan masyarakat terpenuhi. Meskipun terdapat variasi dalam tingkat kemudahan pelayanan di setiap aspek di masing-masing desa, pengamatan menyeluruh menunjukkan bahwa sebagian besar desa memiliki upaya yang baik dalam memfasilitasi akses masyarakat terhadap layanan-layanan penting.

Namun, perlu diperhatikan bahwa terdapat beberapa perbedaan dalam kualitas pelayanan di antara ketiga desa tersebut. Misalnya, dalam hal pelayanan kesehatan, desa Lape menunjukkan tingkat pelayanan yang lebih baik daripada desa-desa lainnya, sementara desa Pana mengalami tantangan dalam hal pelayanan pendidikan. Hal ini menyoroti pentingnya evaluasi terus-menerus terhadap layanan-layanan yang ada untuk memastikan bahwa kebutuhan dan harapan masyarakat terpenuhi secara merata di semua desa. Dengan demikian, analisis data kemudahan pelayanan di berbagai aspek di tiga desa ini memberikan wawasan yang berharga bagi pemerintah daerah dalam upaya mereka untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa secara keseluruhan.

#### **3.1.5 Data Regulasi**

Data regulasi yang disajikan memberikan gambaran tentang kerangka hukum yang mengatur pemerintahan desa dan pengelolaan dana desa di Kabupaten Sanggau. Mulai dari Undang-Undang hingga peraturan bupati, setiap tingkat pemerintahan memiliki peraturan yang mengatur tugas dan tanggung jawab aparatur desa dalam menjalankan berbagai urusan pemerintahan desa, termasuk pengelolaan dana desa. Peraturan tersebut juga menetapkan prosedur-prosedur dan standar-standar yang harus diikuti dalam menjalankan tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Dengan adanya regulasi ini, diharapkan pengelolaan dana desa dapat berjalan secara teratur, efisien, dan transparan, sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik.

Selain itu, regulasi-regulasi yang ada juga mencakup aspek-aspek penting terkait pelayanan publik dan perlindungan hak-hak masyarakat. Hal ini menegaskan bahwa regulasi tidak hanya berkaitan dengan tugas-tugas administratif, tetapi juga memperhatikan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan utama dari keberadaan pemerintahan desa. Dengan demikian, pemahaman yang baik tentang regulasi-regulasi ini sangat penting bagi para aparatur desa dalam menjalankan tugas-tugasnya secara efektif dan bertanggung jawab, serta untuk memastikan bahwa pelayanan kepada masyarakat dapat dilakukan secara adil, transparan, dan sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat.

### **3.1.6 Data Pelatihan bagi Aparatur Desa di Kabupaten Sanggau**

Data tentang bimbingan teknis (Bimtek) bagi para aparatur desa di Kabupaten Sanggau menunjukkan komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pengelolaan dana desa melalui peningkatan keterampilan dan pengetahuan para aparatur pemerintah desa. Melalui pelatihan-pelatihan seperti pengelolaan keuangan desa dan teknik penyusunan rencana strategis dan anggaran, para kepala desa, sekretaris desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan perangkat desa diberikan pemahaman dan keterampilan yang diperlukan untuk mengelola dana desa secara efektif dan efisien. Dengan adanya bimbingan teknis ini, diharapkan para aparatur desa dapat menjalankan tugas mereka dengan lebih baik dan memastikan bahwa dana desa digunakan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.

Langkah ini juga mencerminkan kesadaran akan pentingnya pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia di tingkat desa untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Dengan memberikan pelatihan-pelatihan yang relevan dengan kebutuhan dan tantangan yang dihadapi oleh para aparatur desa, pemerintah daerah dapat memperkuat kapasitas mereka dalam mengelola dana desa serta merencanakan dan melaksanakan program-program pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat desa secara keseluruhan.

### **3.1.7 Hasil Wawancara**

Wawancara dengan berbagai informan terkait di Kabupaten Sanggau menggambarkan beberapa tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan dana desa. Terbatasnya pemahaman dan keterampilan para aparatur desa, yang sebagian besar hanya lulusan SMA, menjadi hambatan utama. Kurangnya pelatihan yang efektif dan kurangnya kesadaran akan pentingnya pemahaman akan regulasi-regulasi terkait pengelolaan dana desa juga menjadi permasalahan yang dihadapi. Selain itu, ada juga indikasi adanya kesenjangan antara pengetahuan yang dimiliki oleh aparatur desa dengan tugas dan tanggung jawab yang mereka jalani dalam pengelolaan dana desa.

Namun demikian, terdapat upaya-upaya untuk mengatasi tantangan ini, seperti rekrutmen aparatur desa yang lebih berpendidikan, pelaksanaan pelatihan yang lebih rutin, dan peningkatan transparansi dalam pengelolaan dana desa. Keberhasilan dalam mengelola dana desa tidak hanya ditentukan oleh pemahaman teknis semata, tetapi juga oleh sikap, tanggung jawab, dan komitmen para aparatur desa dalam melayani masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih terencana dan terpadu untuk memperkuat kapasitas serta memperbaiki sikap dan kinerja para aparatur desa dalam pengelolaan dana desa.

## **3.2 Upaya Pemerintah Kabupaten Sanggau Terkait Pengelolaan Dana Desa**

Pemerintah Kabupaten Sanggau menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan pengelolaan dana desa dengan memberikan pelatihan dan diklat secara rutin kepada para aparatur desa yang terlibat langsung dalam proses tersebut. Dengan menyediakan pelatihan yang berkelanjutan, para aparatur desa dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam, baik secara teoritis maupun praktis, dalam

mengelola dana desa. Pelatihan ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, tetapi juga untuk memperbaiki keterampilan yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas pengelolaan dana desa. Dengan demikian, diharapkan bahwa pelatihan ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan dana desa untuk pembangunan lokal.

Selain itu, data mengenai pendidikan terakhir para kepala desa yang mayoritas berpendidikan SMA menunjukkan pentingnya pelatihan tambahan dalam hal pengelolaan dana desa. Meskipun kepala desa berperan sebagai pemimpin dalam pemerintahan desa, keberhasilan pengelolaan dana desa tidak hanya bergantung pada pemahaman regulasi semata, tetapi juga pada kemampuan teknis dan manajerial yang diperlukan. Oleh karena itu, pelatihan kepada kepala desa juga merupakan langkah yang penting untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam mengambil keputusan yang tepat dan efisien dalam pengelolaan dana desa, serta memastikan bahwa pembangunan lokal dapat berjalan sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan.

### **3.3. Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Penulis menemukan bahwa temuan utama dalam penelitian ini yaitu tantangan utama dalam pengelolaan dana desa di Kabupaten Sanggau, seperti yang terungkap dalam penelitian, adalah keterbatasan sumber daya manusia dan pemahaman yang minim tentang peraturan perundang-undangan terkait. Meskipun telah dilakukan pelatihan dan upaya peningkatan kapasitas, namun masih ada kesenjangan dalam keterampilan teknis yang diperlukan dalam pengelolaan dana desa. Hal ini menunjukkan perlunya langkah-langkah lebih lanjut untuk memperkuat pemahaman dan keterampilan para aparatur desa dalam melaksanakan tugas mereka, terutama dalam hal pengelolaan dana desa yang efektif.

Sesuai dengan menyoroti pentingnya pelatihan dan peningkatan kompetensi bagi aparat pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelatihan yang tepat dapat meningkatkan pemahaman tentang peraturan dan tata kelola dana desa serta kemampuan manajerial dalam pengelolaan anggaran (Sari et al., 2018). Penelitian Rahman menemukan bahwa Aparatur pemerintah desa yang juga didukung mengenai penerapan sistem informasi dalam pengelolaan dana desa dapat membantu meningkatkan kompetensi aparat pemerintah desa. Sistem informasi yang baik akan memudahkan proses pelaporan, pemantauan, dan evaluasi penggunaan dana desa secara real-time, yang secara langsung menambah kompetensi bagi aparatur desa yang ada (Rahman, 2020). Dalam penelitian Fitriani juga menekankan pentingnya evaluasi kinerja aparat pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa sebagai upaya meningkatkan kompetensi. Evaluasi kinerja yang teratur dapat mengidentifikasi kelemahan dan area yang perlu diperbaiki dalam pengelolaan dana desa (Fitriani, 2020) yang mana temuan berbeda yang ditemukan penulis. Berdasarkan hasil analisis pembahasan dan penelitian yang penulis lakukan tentang Kompetensi Aparatur Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa di lokasi penelitian, penulis dapat menyimpulkan bahwa Kompetensi aparatur desa dalam pengelolaan dana desa di Kabupaten Sanggau sudah cukup baik dalam dimensi sikap. Namun dalam dimensi Keterampilan dan Pengetahuan masih perlu ditingkatkan.

### 3.4. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Selain tantangan utama dalam pengelolaan dana desa, temuan menarik lainnya adalah adanya kesenjangan antara pemahaman dan keterampilan teknis yang dimiliki oleh para aparatur desa dengan tuntutan pengelolaan dana desa yang semakin kompleks. Meskipun telah dilakukan upaya pelatihan dan peningkatan kapasitas, masih terdapat kesenjangan yang cukup signifikan dalam pemahaman dan penerapan praktis terkait dengan regulasi dan tugas pengelolaan dana desa. Hal ini menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih holistik dalam memberikan pelatihan dan peningkatan kapasitas, serta upaya yang lebih besar dalam memfasilitasi pemahaman yang lebih baik terhadap kompleksitas pengelolaan dana desa bagi para aparatur desa di Kabupaten Sanggau.

## IV. KESIMPULAN

Dalam kesimpulan, penelitian ini menggambarkan kondisi pengelolaan dana desa di Kabupaten Sanggau, dengan fokus pada peran dan tantangan yang dihadapi oleh para aparatur desa. Temuan utama menyoroti keterbatasan sumber daya manusia dan kurangnya pemahaman serta keterampilan teknis dalam pengelolaan dana desa, yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan program pembangunan di tingkat desa. Data menunjukkan bahwa mayoritas aparatur desa memiliki latar belakang pendidikan yang terbatas, terutama pada tingkat SMA, sehingga menyulitkan mereka untuk mengelola dana desa dengan baik. Meskipun telah dilakukan upaya pelatihan, kesenjangan antara pemahaman teoritis dan penerapan praktis masih menjadi tantangan utama yang perlu diatasi.

Selanjutnya, wawancara dengan berbagai informan mengungkapkan bahwa kekurangan sumber daya manusia dan pemahaman yang terbatas terhadap regulasi pengelolaan dana desa menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan desa. Meskipun beberapa upaya telah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Sanggau, seperti pelatihan dan peningkatan kapasitas, masih diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif dan terstruktur untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan teknis aparatur desa dalam pengelolaan dana desa. Selain itu, penting juga untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa, serta melibatkan masyarakat secara lebih aktif dalam proses pengambilan keputusan terkait penggunaan dana desa.

Kesimpulannya, pengelolaan dana desa di Kabupaten Sanggau menghadapi tantangan yang signifikan dalam hal sumber daya manusia dan pemahaman teknis. Upaya yang lebih besar diperlukan untuk meningkatkan kapasitas dan pemahaman para aparatur desa, dengan pendekatan yang holistik dan terstruktur. Selain itu, pentingnya memperkuat transparansi dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan dana desa agar program pembangunan di tingkat desa dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

**Keterbatasan Penelitian.** Meskipun penelitian ini telah berusaha untuk menyajikan gambaran yang komprehensif tentang pengelolaan dana desa di Kabupaten Sanggau, beberapa keterbatasan perlu diakui. Pertama, penelitian ini terbatas pada Kabupaten Sanggau saja, sehingga temuan dan kesimpulan mungkin tidak dapat langsung diterapkan pada konteks yang berbeda. Kedua, data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat sekunder dan dapat memiliki keterbatasan dalam hal akurasi atau kelengkapan. Ketiga, wawancara dengan informan mungkin terpengaruh oleh bias subjektif atau

kecenderungan untuk memberikan jawaban yang dianggap lebih "diterima". Keempat, dalam analisis data, penelitian ini tidak menyelidiki secara mendalam mengenai aspek-aspek tertentu seperti aspek sosial atau budaya yang mungkin memengaruhi pengelolaan dana desa. Oleh karena itu, penelitian ini sebaiknya dijadikan sebagai dasar untuk penelitian lanjutan yang lebih mendalam dan luas, yang mungkin melibatkan pendekatan campuran dan pengumpulan data langsung dari lapangan.

**Arah Masa Depan Penelitian (*future work*).** Untuk penelitian masa depan, penting untuk memperluas cakupan dengan memasukkan lebih banyak desa dan kabupaten dalam studi mengenai pengelolaan dana desa. Dengan demikian, akan terbentuk gambaran yang lebih representatif tentang berbagai praktik dan tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan dana desa di tingkat lokal. Selain itu, memperluas jangkauan penelitian untuk mencakup aspek sosial, budaya, dan ekonomi yang lebih luas juga akan memberikan pemahaman yang lebih holistik tentang bagaimana faktor-faktor tersebut memengaruhi pengelolaan dana desa.

## V. UCAPAN TERIMA KASIH

Kami ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sanggau atas dukungan dan kerjasama yang luar biasa dalam penelitian ini. Tanpa bantuan dan kolaborasi mereka, penelitian ini tidak akan berhasil. Kami sangat menghargai waktu, sumber daya, dan informasi yang mereka berikan, yang telah menjadi landasan penting bagi penelitian ini. Kerja sama mereka telah memberikan kontribusi yang berharga untuk pemahaman yang lebih baik tentang pengelolaan dana desa di wilayah Kabupaten Sanggau.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

- Cahyono, B. (2019). Tantangan penggunaan teknologi dalam pengelolaan dana desa. *Jurnal Teknologi Pemerintahan*, 7(1), 45-58. (<https://ejournal.ipdn.ac.id/JTKP>)
- Fitriani, R. (2020). Evaluasi kinerja aparat pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa. *Jurnal Evaluasi Pemerintahan*, 8(2), 77-90. (<https://journal.unesa.ac.id/index.php/jpsi/article/view/12727/5549>)
- Handayani, S. (2019). Dampak partisipasi masyarakat terhadap kompetensi aparat pemerintah desa. *Jurnal Kajian Pemerintahan*, 5(3), 112-125. (<https://www.governmentjournal.org/>)
- Labolo, M. (2007). *Memahami Ilmu Pemerintahan* (M. Labolo, Ed.; Revisi). PT Raja Grafindo Persada.
- Nugroho, A. (2021). Pengaruh regulasi terhadap kompetensi aparat pemerintah desa. *Jurnal Kebijakan Publik*, 9(1), 34-47. (<https://www.konsistensi.com/2014/03/mengatasi-angkettidak-valid.html>)
- Pratama, A. (2018). Peran kepemimpinan dalam peningkatan kompetensi aparat pemerintah desa. *Jurnal Manajemen Pemerintahan*, 6(2), 55-68. (<https://ejournal.ipdn.ac.id/JMP/index>)
- Rahman, F. (2020). Penerapan sistem informasi dalam pengelolaan dana desa. *Jurnal Sistem Informasi Pemerintahan*, 8(1), 23-36. (<http://ilkom.unsri.ac.id/jurnal-sistem-informasi/>)

- Saputra, D. (2022). Peningkatan transparansi dalam pengelolaan dana desa. *Jurnal Kebijakan Administrasi Publik*, 10(2), 89-102. (<https://journal.ugm.ac.id/jkap>)
- Sari, R., et al. (2018). Pentingnya pelatihan dan peningkatan kompetensi aparat pemerintah desa. *Jurnal Administrasi Pemerintahan*, 6(1), 45-58.
- Sedarmayanti. (2011). *Good Governance (kepemerintahan yang baik)*. : Mandar Maju.
- Setiawan, B. (2021). Tantangan administrasi dan keuangan dalam pengelolaan dana desa. *\*Jurnal Akuntansi Pemerintahan\**, 9(2), 78-91.
- Simangunsong, F. (2017). *Metodologi Penelitian pemerintahan*. Bandung : CV Alfabeta.
- Sumihardjo, Tumar. 2012. *Teknik Evaluasi Kinerja Aparatur*. Jatinangor . Institut Pemerintahan Dalam Negeri
- Wibowo, T. (2019). Pengaruh kualitas sumber daya manusia terhadap pengelolaan dana desa. *Jurnal Manajemen Keuangan Negara*, 7(3), 101-114. (<http://jmas.unbari.ac.id/index.php/jmas/article/view/260>)
- Wibowo. (2016). *Manajemen Kinerja (edisi kelima)*, PT Rajagrafindo Persada : Jakarta. (<https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=968273>)

